

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN	19
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	20
D. MANFAAT PENELITIAN.....	28
E. TUJUAN PENELITIAN	29
F. SISTEMATIKA DISERTASI.....	30
G. TINJAUAN PUSTAKA.....	30
1. Perkembangan Delimitasi Maritim	30
2. Tinjauan Mengenai Landas Kontinen	52
3. Tinjauan Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.....	56
4. Tahapan Delimitasi Maritim	61
H. LANDASAN TEORI	63
1. Teori Keadilan.....	64
2. Teori Kedaulatan.....	75
3. Konsep Single Maritime Boundary.....	80
I. CARA PENELITIAN.....	80
1. Jenis Penelitian.....	80
2. Jenis Data	81
3. Cara Pengumpulan Data.....	85
4. Analisis Penelitian.....	87

BAB II PROBLEMA PENERAPAN EQUITABLE PRINCIPLE DALAM PENYELESAIAN PERBATASAN ZEE DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN 91

A. DELIMITASI INDONESIA DI ZEE DAN ATAU LANDAS KONTINEN YANG BELUM SELESAI	93
1. Indonesia-Malaysia	100
2. Indonesia-Filipina	117
3. Indonesia-India	120
4. Indonesia-Palau	123
5. Indonesia- Republic Democrate Timor Leste	127
6. Indonesia-Thailand	132
7. Indonesia-Vietnam	134
8. Indonesia –Australia	138
B. HAMBATAN TEKNIS	145
1. Prinsip dan Metode Dalam Delimitasi	148
2. Sarana Prasarana	170
3. Sumber Daya Manusia	175
C. HAMBATAN HUKUM	178
1. Ketidakpastian Hukum (legal uncertainty)	179
2. Predictable Criteria	182
3. Terlalu Fleksibel	184
D. HAMBATAN POLITIK	186
1. Kemauan Politik (political will)	189
2. Isu Perjanjian dan Faktor Historis	199

BAB III EQUITABLE PRINCIPLE DALAM PENENTUAN DELIMITASI DI ZEE DAN LANDAS KONTINEN BERDASARKAN KARAKTER INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE)..... 204

A. PERKEMBANGAN REZIM NEGARA KEPULAUAN DALAM UNCLOS	205
1. Latar Belakang Historis.....	205
2. Definisi.....	210
3. Konsiderasi Hukum Negara Kepulauan.....	213
B. PERKEMBANGAN PERBATASAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.....	216
1. Latar belakang.....	216
2. Deklarasi Djuanda 1957.....	218
C. DEKONSTRUKSI EQUITABLE PRINCIPLE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL	224
1. Interpretasi konsep Equitable principle.....	224
2. Area Equitable Principle	240
3. Orientasi Equitable Principle	248
4. Cakupan Equitable Principle.....	289
5. Tujuan Equitable principle.....	313

BAB IV EQUITABLE PRINCIPLE DAN RELEVANSINYA DENGAN SINGLE MARITIME BOUNDARIES DALAM KASUS PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA DI ZEE DAN LANDAS KONTINEN 317

A. PERKEMBANGAN SEJARAH SINGLE MARITIME BOUNDARIES	317
B. DASAR HUKUM SINGLE MARITIME BOUNDARIES	318
C. LANDAS KONTINEN DAN ZEE: SATU KESATUAN ATAUKAH DUA REZIM YANG BERBEDA?.....	320
D. SINGLE MARITIME BOUNDARY DAN IMPLIKASINYA BAGI PENENTUAN PERBATASAN MARITIM INDONESIA	328

1. Dasar Hukum Penetapan Batas Maritim Antara Landas Kontinen dan ZEE yang Berbeda (UNCLOS 1958 vs. UNCLOS 1982) ...	329
2. Geografis yang Berbeda- Negara kepulauan VS. Coastal State	332
3. Perbedaan Rezim: Landas Kontinen – ZEE.....	334
4. Inequitable Result Bagi Pihak Indonesia	335
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	340
A. KESIMPULAN.....	340
B. SARAN.....	343
DAFTAR PUSTAKA	345
CURRICULUM VITAE.....	363
LAMPIRAN	